



Dokumen Akhir
RENCANA KERJA PERUBAHAN
Tahun Anggaran 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT meridhoi kita sekalian, amin.

Puji dan syukur Kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 telah dapat tersusun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Selain itu dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) OPD dimaksudkan agar meningkatkan akuntabilitas dan kinerja OPD yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Sarilamak, Agustus 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kabupaten Lima Puluh Kota,**



FIDDI A FALA, AP.M.Si

NIP. 19751126 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Perubahan	1
1.2. Landasan Hukum Perubahan	2
1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan Perubahan	5
BAB II.....	6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerahr.	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP	26
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III.....	32
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Indikator Kinerja	32
BAB IV.....	54
PENUTUP.....	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Kaidah Pelaksanaan	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (renja) Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Satpol PP dimulai dengan penyusunan rancangan akhir Renja, verifikasi rancangan akhir oleh Bapelitbang dan terakhir Penetapan Perubahan Renja. Penyusunan rancangan akhir perubahan Renja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 dan berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II tahun berjalan.

Selanjutnya perubahan Renja tahun 2023 memperhatikan kondisi dan keadaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusaha bangkit serta persiapan pesta demokrasi yang tahapannya sudah dimulai pada tahun 2023 yang juga berlaku secara nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Renja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum Perubahan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4)
18. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah bagi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di Tahun 2023 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2023 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang perubahan Renja Satpol PP, Landasan Hukum maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang memuat Program dan Kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja Tahun 2023 beserta Pendanaannya.
- IV. Penutup

Sedangkan tujuan Penyusunan perubahan rencana kerja dimaksud adalah :

1. Sebagai Acuan Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2023.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya di awal tahun anggaran 2023 melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP melaksanakan 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.6.639.824.453,-. Setelah dilakukan pergeseran 1, Satpol PP mengalami pengurangan anggaran sebesar (1.241.568.010) sehingga melaksanakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan anggaran Rp.4.893.229.310,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.2.476.772.368,- atau 50,62%.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II, kondisi bulan juni 2023 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2023
Sampai dengan Triwulan II

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026(akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Renstra Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp.	Target	Rp	I		II		Target	Rp	Target	Rp	K (%)	Rp (%)	
									Target	Rp	Target	Rp							
2	3	4	5		6		7		8		9		10		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan reformasi birokrasi Satpol PP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah		55.965.133.481,67		4.860.193.536	3.907.046.685		778.590.135		1.105.391.123		1.883.981.258			48,67	48,22		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		1.148.679.360,11		9.761.000	10.000.000		0		4.912.000		4.912.000	14.673.000	49,15	49,12			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumemn SPIP Satpol PP jumlah penyusunan revisi renstra Satpol PP yang tersusun tahun 2023 Jumlah penyusunan dokumen renja satpol PP yang tersusun pada tahun 2023 Jumlah penyusunan laporan IKU Satpol PP		249.225.060,93		9.761.000	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumne 1 dokumen	10.000.000	0		4.912.000		4.912.000	14.673.000	49,15	49,12			

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026(akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp.	Target	Rp	I		II		Target	Rp	Target	Rp	K (%)	Rp (%)	
									Target	Rp	Target	Rp							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	jumlah dokumen RKA yang tersusun pada tahun 2023		78.571.693,75		-		-		-		-		-		3,828,000	100,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun tahun 2022		111.517.522,76		-		-		-		-		-		-	57,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersusun pada tahun 2022		105.164.918,75		-		-		-		-		-		-	100,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang tersusun pada tahun 2022		106.789.518,75		-		-		-		-		-		-	37,00	-	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun pada tahun 2022		215.941.520,17		-		-		-		-		-		-	44,00	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LAKIP, LKIP, LKPPD yang tersusun pada tahun 2022		281.469.125,00		-		-		-		-		-		66,00-	-	-	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026(akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp.	Target	Rp	I		II		Target	Rp	Target	Rp	K (%)	Rp (%)	
									Target	Rp	Target	Rp							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD		42.582.748.029,25		4.236.597.137		3.543.234.410		679.058.397		1.018.243.616		1.697.302.013		5.933.899.150	48,37	47,90	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dibayarkan untuk ASN Satpol PP Tahun 2022		42.246.340.985,72		4.232.131.137	14 Bulan	3.537.234.410	3 bulan	679.058.397	3 bulan	1.012.267.616	6 bulan	1.691.326.013		5.923.457.150	48,28	47,81	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun		73.794.890,40		0	-	-	-	-	-	-	-	-		7,254,000	-	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan hasil pemeriksaan		87.537.384,38		0	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/se mester		175.074.768,75		4.466.000	14 Dokumen	6.000.000	-	-	-	5.976.000	-	5.976.000		-	100	99,60	
	Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran 2022		36.711.906,25		0	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-		-	25,00	-	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026(akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp.	Target	Rp	I		II		Target	Rp	Target	Rp	K (%)	Rp (%)	
									Target	Rp	Target	Rp							
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya manusia		806.842.524,69		0		0		-		-		-		-			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian olahraga beserta kelengkapannya		2.022.714.375,00		-	-	-		-		-		-		-			
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian				0	0	0		-		-		-		-			
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti HUT Satpol PP Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten		481.455.614,06		0	0	0		-		-		-		-			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur Satpol PP peserta bimtek Petugas Tindak Internal (PTI)		168.499.148,75		-	-	-											
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan Administrasi Umum		2.422.086.413,30		106.496.700		249.735.600		43.309.300		55.816.000		99.125.300				57,84	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026(akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp.	Target	Rp	I		II		Target	Rp	Target	Rp	K (%)	Rp (%)		
									Target	Rp	Target	Rp								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen alat listrik		30.638.084,53		0	5 komponen	-			-									
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah belanja modal jaringan internet - Jumlah belanja modal laptop - Jumlah belanja modal printer		175.074.768,75	2 unit	21.400.000	-	-		21.400.000		-			-					
	Penyediaan peralatan rumah tangga	- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan - Jumlah belanja modal dispenser		51.848.911,81		9.820.000	1 paket 3 unit	4.173.425		-		-			-					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan - Jumlah kebutuhan ATK kantor	12 bulan	262.612.153	12 bulan	20.010.400	5 Komponen 50 Komponer	12.000.000	10 komponen	1.868.600	15 komponen	783.400	0 Komponen 25 Komponer	2.652.000		34,416,000	22,92	22,10		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah cetak blanko SPPD - Jumlah fotocopy kertas F4/A4 - Jumlah jilid	12 bulan	55.976.655,81	- 30 buku - 850000 lembar - 15 buku	17.491.125	- 2 rim - 10.643 lembar - 72 buah	8.191.100	- 5333lbr	1.599.900	1 rim 1538 lbr 30 buah	900.000	1 rim 6871 lbr 30 lembar	2.499.900		23,423,500	31,23	30,52		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah koran harian lokal yang tersedia	12 bulan	40.967.495,89	-	-	-	-		-		-		-		-				

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026(akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp.	Target	Rp	I		II		Target	Rp	Target	Rp	K (%)	Rp (%)		
									Target	Rp	Target	Rp								
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah makanan dan minuman tamu - Jumlah makanan dan minuman rapat - Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu - Jumlah tamu yang dilayani	12 bulan	52.434.893,24	128 porsi	8.956.000														
					105 porsi		105 porsi	25 prs	1.000.000		734.000		1.734.000		18,632,500	30,21	30,03			
					150 porsi			25 prs		15 prs		40 prs								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi.	12 bulan	1.752.533.450,14	310 orang	114.129.300	307 orang	127.400.000	75 org	29.620.000	115 org	47.010.000	190 orang	76.630.000		92,054,400	60,36	60,15		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.888.698.959,38		19.750.000		-		-		-		19.750.000		-		-		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kendaraan dinas roda 4 - Kendaraan dinas roda 2	1 unit kendaraan dalmas, 4 unit roda 2	2.100.862.500,00		0		-		-		-		-		-		-		
	Pengadaan Mebel	- Jumlah pengadaan kursi - Jumlah pengadaan kursi eselon III - Jumlah pengadaan kursi eselon IV - Jumlah pengadaan meja ½ biro		525.224.306,25		19.750.000		-		-		-		-		-		-		

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026(akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Renstra Sampai Dengan Renja Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp.	Target	Rp	I		II		Target	Rp	Target	Rp	K (%)	Rp (%)	
									Target	Rp	Target	Rp							
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Komputer Laptop perencanaan printer		262.612.153,13		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.360.578.713,72		180.483.251		70.657.000		30.883.238		8.068.107		38.951.345		386,744,259	55,24	55,13	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- jumlah buku cek yang tersedia - jumlah materai 10.000 yang tersedia	12 bulan	38.211.906,25	5 buku 10 lbr	1.000.000	200 lbr	2.000.000	50 lbr	500.000	-	-	500,000	-	2,700,000	25,00	25,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	- jumlah tagihan belanja air - jumlah tagihan internet - jumlah tagihan rekening listrik - jumlah tagihan rekening telepon - jumlah tagihan tv kabel	12 bulan	309.006.966,84	12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket	23.269.507	12 paket 12 paket 12 paket	23.500.000	3 pkt 3 pkt 3 pkt 3 pkt	4.161.298	2 pkt 2 pkt 2 pkt	5.051.907	5 pkt 5 pkt 5 pkt	9.213.145	24,985,275	39,50	39,20		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia - pembayaran honor tenaga kebersihan kantor	12 bulan	2.013.359.840,63	65 bln 24 bln	156.213.744	10 bulan 12 bulan	45.157.000	10 bln 3 bln	26.222.000	0 bln 2 bln	3.016.200	10 bln 5 bln	29.238.200	359,058,984	64,75	64,75		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah agar dalam kondisi Baik		1.701.560.431,22		221.795.323		125.615.750		34.560.000		24.700.000		59.300.000		153,387,400	47,69	47,21	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026(akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp.	Target	Rp	I		II		Target	Rp	Target	Rp	K (%)	Rp (%)	
									Target	Rp	Target	Rp							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang dibiayai pembayaran BBM dan pajak - jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2 - jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4		1.344.145.290,82	5250 ltr	171.313.523	3929 Liter	122.085.750	1109 ltr	34.560.000	500 ltr	23.440.000	1609 ltr	58.000.000		20,678,000	48,00	47,51	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook - Pemeliharaan printer		86.049.284,84	10 unit	6.076.000	2 unit	3.530.000	-	-	2 unit	1.300.000	2 unit	1.300.000		2,052,000	37,00	36,83	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda		24.523.082.259		1.634.420.956		924.795.125		289.275.000		280.541.110		569.819.110		3,154,965,916	61,80	61,62	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	- Jumlah deteksi dini dan cegah dini - Jumlah operasional lapangan		1.785.595.312,50	24 kali	119.950.000	24 data	39.082.000		-	10 data	7.280.000	10 data	7.280.000			18,70	18,63	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026(akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp.	Target	Rp	I		II		Target	Rp	Target	Rp	K (%)	Rp (%)	
									Target	Rp	Target	Rp							
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	- Jumlah personil yang turun kelapangan - data informasi kasus kebisingan yang diterima - jumlah data yang ditindaklanjuti di lapangan - jumlah gangguan kebisingan yang diselesaikan		439.542.875,00	36 kali	37.600.000	36 kali	26.505.375	9 kali	800.000	10 kali	14.300.000	19 kali	15.100.000			57,01	56,97	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat tingkat kabupaten kota	Jumlah wilayah koordinasi dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban umum		742.950.031,25	13 wilayah	8.962.500	13 wilayah	15.505.000		-	2 wilayah	2.500.000	2 wilayah	2.500.000			16,25	16,12	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menyiapkan satlinmas nagari dalam rangka pilwanag serentak		2.459.833.437,50	13 kec.	8.995.000	13 kec	14.000.000	-	-	1 kec	500.000	1 kec	500.000			3,67	3,57	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	- jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah - jumlah peserta pelatihan beladiri anggota satpol pp untuk meningkatkan kualitas SPM - jumlah peserta peningkatan fisik dan mental anggota satpol pp untuk meningkatkan kualitas SPM - jumlah SDM satpol pp dan satlinmas		2.510.000.000	4 orang	29.950.000	28 Orang	15.352.500	6 org	3.450.000	9 org	6.190.000	15 org	9.640.000			62,90	62,79	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026(akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp.	Target	Rp	I		II		Target	Rp	Target	Rp	K (%)	Rp (%)	
									Target	Rp	Target	Rp							
		yang mengikuti Diksar Satpol PP																	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kerjasama penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati Jumlah koordinasi kerjasama penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati		1.246.204.812,50	10 kali	8.945.000	-	15.058.250		1.000.000		2.845.000		3.845.000			25,60	25,53	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		15.277.134.996,84		1.402.423.456	12 bulan	779.182.000	3 bln	284.025.000	2 bln	241.766.110	5 bln	525.791.110			67,69	67,48	
	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan penyusunan SOP		239.013.818,75	41 org	8.999.000	15 org	9.525.000		-	7 org	4.660.000	7 org	4.660.000			49,00	48,92	
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	Jumlah pelayanan dampak penegakkan perda dan perkada		446.075.943,50	13 kec	8.605.000	13 kec	10.585.000	-	-	1 kec	500.000	1 kec	500.000			4,80	4,72	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026(akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp.	Target	Rp	I		II		Target	Rp	Target	Rp	K (%)	Rp (%)	
									Target	Rp	Target	Rp							
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan pelanggaran perda		4.203.157.312,50		72.839.400		49.937.000		1.900.000		15.275.000		17.175.000				34,39	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	- Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati - Sosialisasi Peraturan Daerah dan peraturan Bupati terkait ketentuan Bidang Cukai		1.548.476.250,00	10 kali	22.999.400	81 orang	18.511.750		-	40 org	7.600.000	40 org	7.600.000		38,783,000	41,10	41,06	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	- Jumlah pengawasan Perda dan Perbup - Jumlah sosialisasi dan koordinasi pengawasan Perda dan Perbup		1.138.781.000,00	12 kali	8.930.000	15 laporan	-	7.740.000		5 lap	2.865.000	5 lap	2.865.000			37,10	37,02	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	- Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah - Jumlah penegakan perda - Jumlah sidang tipiring - Jumlah koordinasi pemberantasan barang kena cukai ilegal		1.515.900.062,50	5 kali 20 kali 1 kali	40.910.000	46 org/hari 57 org/hari	23.685.250	5 org	1.900.000	8 kali	4.810.000	5 kali 8 kali	6.710.000		327,819,100	28,86	28,33	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026(akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp.	Target	Rp	I		II		Target	Rp	Target	Rp	K (%)	Rp (%)	
									Target	Rp	Target	Rp							
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/kota	Persentase penurunan pelanggaran perda		1.010.211.469	12 bulan	33.250.000		11.450.500		-		5.800.000		5.800.000		15.730.000		50,65	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	- Jumlah aparatur Satpol PP yang mengikuti diklat Intelijen PPNS di Jawa Barat - Konsultasi dan Koordinasi pengembangan kapasitas PPNS		1.010.211.469	2 org 70 org	33.250.000	- 27 org	11.450.500		-		5.800.000		5.800.000		15.730.000	51,00	50,65	
			-	55,965,133,481,67	-	6.600.703.982	-	4.893.229.310	-	1.069.765.135	-	1.407.007.233	-	2.476.772.368		6,390,895,625	51,62	50,62	

Dari Tabel diatas dapat disampaikan bahwa Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran dan realisasi, dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Satpol PP dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Rp.4.912.000,- atau 49,12% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 49,15%.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 0%.

Karena keterbatasan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Pembiayaan kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD melekat pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 0%.

Karena keterbatasan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Pembiayaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD melekat pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 0%.

Realisasi fisik kegiatan ini 50% sedangkan realisasi keuangannya 0%, dikarenakan pembiayaan kegiatan ini melekat pada Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.537.234.410,- dan realisasi keuangan Rp.1.691.326.013,- atau 47,81% dengan realisasi fisik kegiatan

mencapai 48,28%.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.5.976.000,- atau 99,60% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

4. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik 0%.

Pembiayaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD melekat pada sub kegiatan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD dikarenakan keterbatasan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik 45%.

Pembiayaan sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan melekat pada sub kegiatan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD dikarenakan keterbatasan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik 25%.

Pembiayaan sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran melekat pada sub kegiatan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD dikarenakan keterbatasan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik 0%.

Kegiatan ini tidak jadi terlaksana karena keterbatasan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja.

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik 0%.
 - c. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik 0%.
Kegiatan ini tidak jadi terlaksana karena keterbatasan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp. 0,- atau 0% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 0%.
Kegiatan ini tidak jadi terlaksana karena keterbatasan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 0%.
Kegiatan ini tidak jadi terlaksana karena keterbatasan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan sampai Triwulan II Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik mencapai 0%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik mencapai 0%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.173.425,- dan realisasi keuangan sampai Triwulan II Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik mencapai 0%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.2.652.000,- atau 22,10% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 22,92%.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.191.100,- dan realisasi keuangan sampai Triwulan II Rp.2.499.900,- atau 30,52% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 31,23%.
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan sampai Triwulan II Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 0%.
Kegiatan ini tidak jadi terlaksana karena keterbatasan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja.
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.775.000,- dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Rp.1.734.000,- atau 30,03% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 30,21%
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan lokasi anggaran sebesar Rp.127.400.000,- dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Rp.76.630.000,- atau 60,15% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 60,36%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 0%.
Kegiatan ini tidak jadi terlaksana karena keterbatasan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 0%
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik 0%.
Kegiatan ini tidak jadi terlaksana karena keterbatasan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.500.000,- atau 25% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 25%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.500.000,- dan realisasi keuangan Rp.9.213.145,- atau 39,20% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 39,50%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.157.000,- dan realisasi keuangan Rp.29.238.200,- atau 64,75% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 64,75%.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.085.750,-,realisasi keuangan Rp.58.000.000,- atau 47,51% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 48,00%.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.530.000,- realisasi keuangan Rp.1.300.000,- atau 36,83% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 37%
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp. 0,- atau 0% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 0%.

8. PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39,082.000,- dan realisasi keuangan Rp.7.280.000,- atau 18,63% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 18,70%.

- b. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.505.375,- dan realisasi keuangan Rp.15.100.000,- atau 56,97% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 57,01%.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat tingkat kabupaten kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.505.000,- dan realisasi keuangan Rp.2.500.000,- atau 16,12% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 16,25%.
- d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.500.000,- atau 3,57% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 3,67%.
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.352.500,- dan realisasi keuangan Rp.9.640.000,- atau 62,79% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 62,90%.
- f. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.058.250,- dan realisasi keuangan Rp.3.845.000,- atau 25,53% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 25,60%.
- g. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.779.182.000,- dan realisasi keuangan Rp.525.791.110,- atau 67,48% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 67,69%.

- h. Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.525.000,- dan realisasi keuangan Rp.4.660.000,- atau 48,92% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 49,00%.
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.585.000,- dan realisasi keuangan Rp.500.000,- atau 4,72% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 4,80%
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota
- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.511.750,- dan realisasi keuangan Rp.7.600.000,- atau 41,06% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 41,10%.
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.740.000,- dan realisasi keuangan Rp.2.865.000,- atau 37,02% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 37,10%.
 - c. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.685.250,- dan realisasi keuangan Rp.6.710.000,- atau 28,33% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 28,86%.
3. PPNS Kabupaten/kota
- a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.450.500,- dan realisasi keuangan Rp.5.800.000,- atau 50,65% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 51,00%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Bila di disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan terjadinya realokasi anggaran, maka terdapat perubahan target capaian kinerja Pencapaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama Satpol PP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
1	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	- Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	%	70
		- Persentase Penyakit Masyarakat Yang Tertangani	%	78
2	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	- Persentase Pengaduan Masyarakat Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindak lanjuti	%	86

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

Sesuai dengan analisis permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan isu strategis serta kondisi ideal dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain di tabel 2.3 sebagaimana berikut :

ISU STRATEGIS	PERMASALAHANNYA	KONDISI IDEAL
1. Penegakan Perda	Masih ditemui pelanggaran Perda antara lain : Bangunan tidak ber-IMB atau Bangunan yg melanggar ketentuan Perda, Usaha tidak dilengkapi SIUP/HO, Perizinan Reklame/Spanduk baik berdasarkan data maupun laporan	Terwujudnya ketertiban Perizinan melalui kerja sama Yang terintegrasikan antara Satpol PP dengan Dinas/Instansi Terkait
2. Gangguan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Masih ditemui Bangunan liar di lahan Fasos Fasum Pemerintah; Peredaran Minuman Beralkohol; dan contoh yang berkaitan dengan Ketenteraman antara lain Keberadaan Anjal, Gelandang-Pengemis, Pengamen di jalur-jalur Protokol; dan Keberadaan PSK yang menjadi Penyakit Masyarakat, serta Peminta Sumbangan	Terciptanya ketentraman masyarakat Melalui Penataan titik-titik gangguan ketertiban umum dan ketenteraman dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait, swasta, dan peran masyarakat
3. Perlindungan Masyarakat	Adanya laporan gangguan Kamtibmas seperti tawuran dan daerah rawan sosial; Penanganan Bencana Alam melalui antisipasi dini yang belum optimal; Belum dilakukan Deteksi dini daerah rawan sosial	Meningkatnya kapasitas anggota Linmas melalui keterlibatan pihak Kecamatan dan Nagari serta peran aktif masyarakat

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satpol PP

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta belum maksimalnya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, penerapan standar pelayanan minimal urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satpol PP untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda. Kemudian dari beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mempunyai sanksi hukum belum semuanya dapat ditegakkan.

Selanjutnya kondisi lingkungan masyarakat yang heterogen dan konflik kepentingan, dimungkinkan menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah sehingga adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum, maka perlu penyelesaian gangguan tersebut agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar dengan terciptanya situasi tertib dan tenteram.

Kemudian dari segi Perlindungan Masyarakat yang artinya suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan, dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan memelihara keamanan, ketentraman ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun pada saat ini, penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum maksimal pada Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Serta Pelindungan Masyarakat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota bahwa Satpol PP harus melaksanakannya dengan target dan realisasi kualitas mutu pelayanan harus 100% sehingga pelayanan minimal terhadap warga negara yang berhak dapat terpenuhi. Ada 3 (tiga) mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibum yaitu: 1. standar operasional prosedur Satpol PP; 2. standar sarana prasarana Satpol PP; 3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP

Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten lima puluh Kota yang dapat mengganggu kelancaran/kesuksesan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu kurangnya jumlah, kualitas dan komitmen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Sedangkan faktor penghambat lainnya adalah masih kurangnya anggaran, sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT. Sebagaimana dipaparkan di dalam tabel berikut :Tabel 2. 4

	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
LINGKUNGAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan anggaran 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja. 3. Dasar hukum. 4. Ketersediaan kuantitas SDM Aparatur Satpol PP. 5. Adanya kerjasama antar instansi terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran yang ditetapkan. 2. Keterbatasan Sarpras. 3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi. 4. Keterbatasan kualitas SDM Satpol PP. 5. Kerjasama antar instansi terkait yang belum terintegrasi dengan baik.
	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
LINGKUNGAN EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan anggaran dan Sarpras dari Pemkab. 2. Adanya Diklat-Diklat yang diberikan kepada personil PNS Satpol PP dalam pengembangan kompetensi. 3. Manajemen Organisasi yang berorientasi hasil sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang baik. 4. Adanya potensi aparatur Satpol PP hasil mengikuti Diklat. 5. Keberadaan Jafung Pol PP. 6. Keinginan masyarakat pada kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertib. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang diukur melalui SAKIP. 2. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. 3. Tuntutan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik. 4. Tuntutan peningkatan kompetensi aparatur Satpol PP baik secara sikap, pengetahuan, dan wawasan. 5. Kontrol sosial (masyarakat) semakin meningkat yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi.

Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023.

1. Penegakan semua Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mempunyai sanksi hukum belum optimal
2. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum maksimal
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur, kuantitas dan kualitas aparatur serta penerapan standar pelayanan minimal urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

5. Penyelenggaraan tata pemerintahan seperti pelayanan, pengelolaan keuangan, perencanaan dan kapasitas sumber daya aparatur untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi jika ditinjau baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada saat ini kurang memadai.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Organisasi Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Namun sampai dengan proses penyusunan Renja Tahun 2023 dilakukan, belum diterima usulan program/kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama Perangkat Daerah : Satpol PP

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	N I H I L				
2.					

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Indikator Kinerja

Dengan terjadinya refocussing dan realokasi anggaran Tahun Anggaran 2023, maka terjadi perubahan target indikator pada beberapa kegiatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Perubahan Target Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
			RKPD 2023	Perubahan RKPD 2023
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		RKPD 2023	Perubahan RKPD 2023
1.	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang perangkat daerah	20%	20%
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen SPIP Satpol PP	1 dokumen	- 1 dokumen
		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Full day SPM dan Perencanaan	43 Org /Hari	-
		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Half day SPM dan Perencanaan	60 Org /Hari	-
		Jumlah penyusunan dokumen Refisi Renstra Satpol PP yang tersusun tahun 2023	1 dokumen	-
		Jumlah penyusunan dokumen Renja Satpol PP yang tersusun tahun 2023	1 dokumen	- 1 dokumen
		Jumlah Penyusunan laporan IKU Satpol PP	1 laporan	- 1 laporan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20%	20%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- 0 orang bulan - 14 bulan	- 14 bulan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
		- Jumlah pembayaran gaji dan Tunjangan PNS - Jumlah Pembayaran tunjangan kinerja PNS	- 12 bulan	- 6 bulan
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	- Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Full day Keuangan - Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Half day Keuangan	- 21 orang hari - 40 orang hari	- -
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	20%	20%
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	- Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis full day administrasi kepegawaian - Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis half day pengolahan administrasi kepegawaian	43 orang/hari 47 orang/hari	- -
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase peningkatan Administrasi Umum	20%	20%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Komponen alat listrik - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- 6 komponent - 0 Paket	- -
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah belanja modal jaringan internet - Jumlah belanja modal laptop - Jumlah belanja modal printer	- 1 unit - 1 unit - 1 unit	- - -
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah belanja gorden - Jumlah belanja modal tv - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- 17 meter - 1 unit - 10 Paket	- 0 meter - 0 unit - 10 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan - Jumlah kebutuhan ATK Kantor - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- 19 komponen - 52 komponen - 0 Paket	-5 komponen -50 komponen -0 Paket

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak blanko SPPD Jumlah foto copy kertas folio/kwarto Jumlah jilid	- 15 Rim - 85000 lembar - 150 buah	- 2 Rim - 10643 lembar - 72 buah
	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia Jumlah tamu yang dilayani	- 130 porsi - 150 porsi	- 105 porsi - 105 porsi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 350 Laporan	- 250 Laporan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	20%	20%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pengadaan kursi Jumlah pengadaan kursi eselon III Jumlah pengadaan kursi eselon IV Jumlah pengadaan meja 1/2 biro Jumlah Pengadaan meja biro	- 0 Unit - 48 buah - 4 buah - 4 buah - 10 buah - 10 buah	- - - - - -
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	20%	20%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah buku cek yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah materai yang tersedia	5 buku 0 Laporan 400 lembar	- 0 buku - 0 Laporan - 200 lembar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan internet yang tersedia jumlah tagihan rekening listrik yang tersedia jumlah tagihan rekening telepon yang tersedia jumlah tagihan tv kabel	- 12 paket - 12 paket - 12 paket - 12 paket	- 150 M ³ - 5000 KWH - 8 bulan -
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah honor tenaga kebersihan kantor yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah pelayanan umum kantor yang tersedia	24 bulan 0 Laporan 65 bulan	- 12 orang/bln - 0 Laporan - 0 bulan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	20%	20%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinan - Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2(dua) - Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4(empat) 	<ul style="list-style-type: none"> 0 Unit 10 unit/tahun 6 unit/tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Unit - 10 unit/tahun - 3 unit/tahun - 4 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemeliharaan personal komputer/note book - Jumlah pemeliharaan printer - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 	<ul style="list-style-type: none"> 10 Unit/tahun 7 unit/tahun 0 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> -2 Unit/tahun -3 unit/tahun -0 Unit
II.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase penurunan kasus pelanggaran PERDA	34%	34%
1.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah deteksi dini dan deteksi dini - Jumlah operasional lapangan - Jumlah pelayanan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan - Jumlah wilayah dalam pengawasan patroli 	<ul style="list-style-type: none"> - 24 data - 75 kali - 13000 jiwa - 13 wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> - 24 data - 75 kali - 13000 jiwa - 13 wilayah
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah pelayanan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk	- 13000 jiwa	- 13000 jiwa

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
		rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan - Jumlah personil yang turun kelapangan, data dan informasi kasus kebisingan yang diterima, jumlah data yang ditindaklanjuti di lapangan, jumlah gangguan kebisingan yang diselesaikan	- 36 kali	- 36 kali
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat tingkat kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak - Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Jumlah Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas - Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Jumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah komponen untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan OPD terkait - Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Anggota Satlinmas 	<ul style="list-style-type: none"> -700 Lembar -50 Lembar -1350 Liter -500 Porsi -20 Unit/Hari -2 Dokumen -17 Komponen -6 Komponen -296 Orang/Hari 	<ul style="list-style-type: none"> -0 Lembar -0 Lembar -300 Liter -0 Porsi -1 Unit/Hari -2 Dokumen -0 Komponen -6 Komponen -296 Org/Hari
	Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Komponen Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - Jumlah Komponen Belanja Untuk Kursus Singkat/Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SPM Anggota Satlinmas Nagari 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 1 Komponen - 79 Jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 0 Komponen - 0 Jiwa

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Komponen untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi dengan OPD Terkait - Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Anggota Satlinmas Nagari 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Komponen - 6 Laporan - 11 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - 0 Komponen - 6 Laporan - 11 Laporan
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Jumlah peserta Pelatihan bela diri Anggota Satpol PP untuk meningkatkan Kualitas SPM - Jumlah peserta Peningkatan Fisik dan Mental Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kualitas Standar Pelayanan Minimum - Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Mengikuti DIKSAR SATPOL PP 	<ul style="list-style-type: none"> - 65 Orang - 1200 Orang - 800 Orang - 12 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> - 65 Orang - 0 Orang - 0 Orang - 0 Orang
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan - Jumlah kerjasama dan kemitraan - Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - 24 Dokumen - 24 objek - 24 kali 	<ul style="list-style-type: none"> - 24 Dokumen - 24 objek - 24 kali
	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik - Jumlah Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Jumlah Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN - Jumlah Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - Jumlah Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya - Jumlah Borgolyang tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - 78 Buah - 641 Orang - 717 Orang - 21 Bulan - 150 Bulan - 4 Unit - 146 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> - 0 Buah - 470 Orang - 470 Orang - 470 Bulan - 150 org/Bln - 0 Unit - 0 Unit

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
		Jumlah HT yang tersedia Jumlah komponen Belanja Modal Alat Perlindungan Lainnya Jumlah Komponen Jasa Tenaga Keamanan Jumlah Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia Jumlah Tenda pleton yang tersedia Jumlah Velbed yang tersedia	146 Unit 2 Komponen 2 Komponen 8 Buah 0 Unit 2 Unit 50 Unit	- 0 Unit - 0 Komponen - 0 Komponen - 0 Buah - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan Jumlah koordinasi dan Konsultasi penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimum	0 Dokumen 1 Dokumen 35 Orang	- 0 Dokumen - 0 Dokumen - 35 Orang
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos Jumlah Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Jumlah Komponen Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan ATK Jumlah Komponen Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Jumlah Komponen Belanja Perjalanan Dinas Biasa Jumlah Laporan Pengaduan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	50 Lembar 1000 Liter 520 Porsi 21 Unit/Hari 15 Komponen 3 Komponen 6 Komponen 5 Laporan	- 0 Lembar - 300 Liter - 0 Porsi - 0 Unit/Hari - 0 Komponen - 0 Komponen - 6 Komponen - 5 Laporan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
2.	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota	Persentase penurunan pelanggaran Perda	100%	100%
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	- Jumlah Koordinasi dan Pembinaan - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ - Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah	- 15 kali - 15 Laporan - 1000 jiwa	- 15 kali - 15 Laporan - 1000 jiwa
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota - Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda	- 15 Laporan - 1500 jiwa	- 15 Laporan - 1500 jiwa
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	- Jumlah warganegara yang mendapat layanan akibat penegakan Perda dan perkada	- 5000 jiwa	- 5000 jiwa
3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase penegakan perda yang ditegakkan	5%	5%
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	- Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk meningkatkan kualitas Standar Pelayanan Minimum Satpol PP - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada guna peningkatan standar pelayanan minimum	- 27 Orang - 6 Laporan	- 27 Orang - 6 Laporan

a. Rencana Kerja dan Pendanaan

Penetapan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja untuk Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada

program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan Bidang Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Ringkasan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.2

Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah 3. Administrasi umum perangkat daerah 4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Lingkup Bidang Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Berdasarkan dua pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 program dengan 8 kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran

program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.4 berikut.

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTATAHUN 2023

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Lembar 1 dari 8

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					5.008.709.310	5.793.658789			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000		Tidak berubah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen SPIP Satpol PP - Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Full day SPM dan Perencanaan - Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Half day SPM dan Perencanaan - Jumlah penyusunan dokumen Refisi Renstra Satpol PP yang tersusun tahun 2023 - Jumlah penyusunan dokumen Renja Satpol PP yang tersusun tahun 2023 - Jumlah Penyusunan laporan IKU Satpol PP 	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> - 1 dokumen - 43 Orang Hari - 60 Orang Hari - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 laporan 	10.000.000	10.000.000		Tidak berubah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun pada tahun 2022	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	12 Bulan	-	--		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun tahun 2022	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	12 Bulan	-	-			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersusun pada tahun 2022	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	12 Bulan					
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang tersusun pada tahun 2022	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	12 Bulan	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun pada tahun 2022	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	12 Bulan	-	-			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LAKIP, LKJIP, LKPPD yang tersusun pada tahun 2022	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	12 Bulan	-	-			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah pembayaran gaji dan Tunjangan PNS - Jumlah Pembayaran tunjangan kinerja PNS	Satuan Polisi Pamong Praja	- 0 orang bulan - 14 bulan - 12 bulan	- 14 bulan - 6 bulan	3.537.234.410	3.724.707.868	RUTIN OPD	Berubah	Penambahan kekurangan anggaran gaji dan tunjangan PNS
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Ful day Keuangan - Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Half day Keuangan - Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	21 orang hari 40 orang hari	- - 12 laporan	6.000.000 -	6.000.000		Tidak Berubah	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan hasil pemeriksaan	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-					
	Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran 2022	Satuan Polisi Pamong Praja	1 dokumen	1 dokumen					
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%					
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian olahraga beserta kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	- Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis full day administrasi kepegawaian - Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis half day pengolahan administrasi kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	43 orang/hari 47 orang/hari	-	-	-		Tidak berubah	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti HUT Satpol PP Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur Satpol PP peserta bimtek Petugas Tindak Internal (PTI)	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Komponen alat listrik - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Satuan Polisi Pamong Praja	6 komponent 0 Paket	-				Tidak berubah	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah belanja modal jaringan internet - Jumlah belanja modal laptop - Jumlah belanja modal printer	Satuan Polisi Pamong Praja	1 unit 1 unit 1 unit	- - -	-	-		Tidak berubah	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	- Jumlah belanja gordena - Jumlah belanja modal tv - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Satuan Polisi Pamong Praja	17 meter 1 unit 10 Paket	0 meter 0 unit 10 Paket	4.173.425	4.173.425		Tidak berubah	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan - Jumlah kebutuhan ATK Kantor - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Satuan Polisi Pamong Praja	19 komponen 52 komponen 0 Paket	5 komponen 50 komponen 0 Paket	12.000.000	12.000.000		Tidak berubah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah cetak blanko SPPD - Jumlah foto copy kertas folio/kwarto - Jumlah jilid	Satuan Polisi Pamong Praja	15 Rim 85000 lembar 150 buah	2 Rim 10643 lembar 72 buah	8.191.100	8.191.100		Tidak Berubah	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koran harian lokal yang tersedia Jumlah koran harian regional yang tersedia	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-					
	Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia - Jumlah tamu yang dilayani	Satuan Polisi Pamong Praja	130 porsi 150 porsi	105 porsi 105 porsi	5.775.000	5.775.000		Tidak berubah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	350 laporan	250 laporan	127.400.000	127.400.000		Tidak Berubah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-					
	Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah pengadaan kursi - Jumlah pengadaan kursi eselon III - Jumlah pengadaan kursi eselon IV - Jumlah pengadaan meja 1/2 biro - Jumlah Pengadaan meja biro	Satuan Polisi Pamong Praja	- 0 Unit - 48 buah - 4 buah - 4 buah - 10 buah - 10 buah		-	-		Tidak berubah	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gorden	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah buku cek yang tersedia - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - jumlah materai yang tersedia	Satuan Polisi Pamong Praja	5 buku 0 Laporan 400 lembar	0 buku 0 Laporan 200 lembar	2.000.000	2.000.000		Tidak berubah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan internet yang tersedia - jumlah tagihan rekening listrik yang tersedia - jumlah tagihan rekening telepon yang tersedia - jumlah tagihan tv kabel	Satuan Polisi Pamong Praja	12 paket 12 paket 12 paket 12 paket	150 M ³ 5000 KWH 8 bulan	23.500.000	23.500.000		Tidak Berubah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- jumlah honor tenaga kebersihan kantor yang tersedia - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah pelayanan umum kantor yang tersedia	Satuan Polisi Pamong Praja	24 bulan 0 Laporan 65 bulan	12 orang/bln 0 Laporan 0 bulan	45.157.000	45.157.000		Tidak berubah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah agar dalam kondisi Baik	Satuan Polisi Pamong Praja	10 0%	100%					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinan - Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2(dua) - Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4(empat)	Satuan Polisi Pamong Praja	0 Unit 10 unit/tahun 6 unit/tahun	4 Unit 10 unit/tahun 3 unit/tahun 4 unit	122.085.750	122.085.750		Tidak berubah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemeliharaan personal komputer/note book Jumlah pemeliharaan printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 	Satuan Polisi Pamong Praja	10 Unit/tahun 7 unit/tahun 0 Unit	2 Unit/tahun 3 unit/tahun 0 Unit	3.530.000	3.530.000		Tidak berubah	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-		-	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Satuan Polisi Pamong Praja	67%	67%					
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah deteksi dini dan deteksi dini Jumlah operasional lapangan Jumlah pelayanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, peminaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan Jumlah wilayah dalam pengawasan patroli 	Satuan Polisi Pamong Praja	24 data 75 kali 13000 jiwa 13 wilayah	24 data 75 kali 13000 jiwa 13 wilayah	39.082.000	39.082.000		Tidak berubah	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelayanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan Jumlah personil yang turun kelapangan, data dan informasi kasus kebisingan yang diterima, jumlah data yang ditindaklanjuti di lapangan, jumlah gangguan kebisingan yang diselesaikan 	Satuan Polisi Pamong Praja	13000 jiwa 36 kali	13000 jiwa 36 kali	26.505.375	26.505.375		Tidak berubah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat tingkat kabupaten kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak - Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Jumlah Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas - Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Jumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah komponen untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan OPD terkait - Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Anggota Satlinmas 	Satuan Polisi Pamong Praja	700 Lembar	0 Lembar	15.505.000	15.505.000		Tidak berubah	
				50 Lembar	0 Lembar					
				1350 Liter	300 Liter					
				500 Porsi	0 Porsi					
				20 Unit/Hari	1 Unit/Hari					
				2 Dokumen	2 Dokumen					
				17 Komponen	0 Komponen					
				6 Komponen	6 Komponen					
				296 Orang/Hari	296 Org/Hari					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kenyataan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Komponen Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - Jumlah Komponen Belanja Untuk Kursus Singkat/Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SPM Anggota Satlinmas Nagari - Jumlah Komponen untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi dengan OPD Terkait - Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Anggota Satlinmas Nagari	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen 1 Komponen 79 Jiwa 2 Komponen 6 Laporan 11 Laporan	1 Dokumen 0 Komponen 0 Jiwa 0 Komponen 6 Laporan 11 Laporan	14.000.000	14.000.000		Tidak Berubah	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Jumlah peserta Pelatihan bela diri Anggota Satpol PP untuk meningkatkan Kualitas SPM - Jumlah peserta Peningkatan Fisik dan Mental Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kualitas Standar Pelayanan Minimum - Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Mengikuti DIKSAR SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja	65 Orang 1200 Orang 800 Orang 12 Orang	65 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang	15.352.500	15.352.500		Tidak Berubah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah kerjasama dan kemitraan Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	24 Dokumen 24 objek 24 kali	24 Dokumen 24 objek 24 kali	15.058.250	15.058.250		Tidak berubah	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jumlah Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Jumlah Borgolyang tersedia Jumlah HT yang tersedia Jumlah komponen Belanja Modal Alat Perlindungan Lainnya Jumlah Komponen Jasa Tenaga Keamanan Jumlah Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia Jumlah Tenda pleton yang tersedia Jumlah Velbed yang tersedia	Satuan Polisi Pamong Praja	78 Buah 641 Orang 717 Orang 21 Bulan 150 Bulan 4 Unit 146 Unit 146 Unit 2 Komponen 2 Komponen 8 Buah 0 Unit 2 Unit 50 Unit	0 Buah 470 Orang 470 Orang 470 Bulan 150 orang/Bulan 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Komponen 0 Komponen 0 Buah 0 Unit 0 Unit 0 Unit	779.182.000	1.357.462.790		Berubah	Penambahan Gaji THL 5 untuk 5 bulan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan - Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan - Jumlah koordinasi dan Konsultasi penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimum 	Satuan Polisi Pamong Praja	0 Dokumen	0 Dokumen	9.525.000	9.525.000		Tidak berubah	
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos - Jumlah Belanja Bahan Bakar dan Pelumas - Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Jumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - Jumlah Komponen Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan ATK - Jumlah Komponen Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak - Jumlah Komponen Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Jumlah Laporan Pengaduan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 	Satuan Polisi Pamong Praja	50 Lembar	0 Lembar	10.585.000	10.585.000		Tidak Berubah	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Satuan Polisi Pamong Praja	32%	32%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Koordinasi dan Pembinaan - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ - Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah 	Satuan Polisi Pamong Praja	15 kali 15 Laporan 1000 jiwa	15 kali 15 Laporan 1000 jiwa	18.511.750	18.511.750		Tidak Berubah	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota - Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda 	Satuan Polisi Pamong Praja	15 Laporan 1500 jiwa	15 Laporan 1500 jiwa	7.740.000	7.740.000		Tidak berubah	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah warganegara yang mendapat layanan akibat penegakan Perda dan perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	5000 jiwa	5000 jiwa	23.685.250	23.685.250		Tidak Berubah	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/kota		Satuan Polisi Pamong Praja	4%	4%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk meningkatkan kualitas Standar Pelayanan Minimum Satpol PP Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada guna peningkatan standar pelayanan minimum	Satuan Polisi Pamong Praja	27 Orang	27 Orang	11.450.000	11.450.000		Tidak Berubah	
				6 Laporan	6 Laporan					

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman kepada Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tidak mengesampingkan data/ masukan/ rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, unsur masyarakat.

Dokumen Renja Perubahan OPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023. Kebutuhan pendanaan yang telah dikompilasikan dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (renja perubahan) OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 disusun dengan memperhatikan antara lain :

1. Rekomendasi/usulan dari unsur masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam mengimplementasikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (renja perubahan) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja OPD tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja OPD, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD Tahun Anggaran (TA) 2023;
2. Pada akhir tahun anggaran 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023.